PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA

¹ Marcellino Michael David Limbat, ² Dr. Janeman J Lanawaang, S.H.,M.H
³ Harly Rumagit, S.H.,M.H
 Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: davidlimbat@gmail.com
yannylanawaang@gmail.com
harlyrumagit@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted 15 Februari 2025

Accepted 20 Februari 2025

Published 21 Februari 2025

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan berbagai dampak hukum, termasuk dalam perspektif hukum perdata. Anak-anak sering kali dianggap belum mampu bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, sehingga tanggung jawab hukum beralih kepada orang tua atau wali berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata tentang tanggung jawab atas perbuatan orang yang berada di bawah pengawasan. Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas oleh anak bisa mengarah pada gugatan ganti rugi yang harus ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Artikel ini mengkaji bagaimana ketentuan dalam KUHPperdata diterapkan dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak, peran pengawasan orang tua, dan relevansi prinsip tanggung jawab hukum. Selain itu, dibahas pula hubungan antara aspek preventif dan represif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak. Penelitian ini bertujuan guna membagikan uraian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum awas dalam permasalahan pelanggaran kemudian lintas oleh anak dan implikasinya kepada pihak-pihak terkait.

Kata Kunci : *Pelanggaran lalu lintas, anak, KUHPperdata,*

PENDAHULUAN

Di era teknologi yang terus maju di era modern, khususnya dalam bidang transportasi, memberikan banyak manfaat melalui penggunaan yang efisien, cepat, aman, dan nyaman. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul juga berbagai masalah yang diderita oleh penggunanya.¹ Perkembangan dan pertumbuhan yang cepat dalam alat transportasi, baik di darat, udara, maupun laut di Indonesia, memberikan dampak yang signifikan, salah satunya adalah akibat yang ditimbulkan oleh kemajuan alat transportasi itu. Pada zona transportasi darat, kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun roda 4, Semakin padatnya lalu lintas meningkatkan potensi kecelakaan, sebagai salah satu konsekuensi dari kemajuan transportasi yang pesat.

Dampak dari penggunaan kendaraan bermotor dalam keseharian mencakup sisi positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sementara dampak negatifnya termasuk ketergantungan pada penggunaan transportasi dan keinginan untuk selalu merasa nyaman.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah.²

¹ Addib Rifandi Hafedh Kurnia, dalam naskah publikasinya berjudul Pertanggungjawaban Anak dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan Sukoharjo), yang diterbitkan oleh Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015, halaman 1.

²https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Harly+rumagit&btnG=#d=gs_qabs&t=1739006252075&u=%23p%3DgBsBPhlNwPUJ

Banyak pelajar SMP dan SMA di Indonesia yang mengemudikan kendaraan tanpa larangan sekolah dan dengan persetujuan orang tua. Kondisi ini berisiko tinggi karena emosi mereka masih labil. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan ini, yang sering dianggap normal. Selain itu, lemahnya pengawasan oleh aparat pemerintah yang tidak tegas dalam menindak pengendara yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta pengawasan orang tua yang longgar turut menjadi alasan mengapa banyak remaja yang mengendarai motor di bawah usia 17 tahun. Seharusnya, mereka tidak diizinkan untuk mengemudi karena remaja di bawah usia 17 tahun secara psikologis tidak stabil emosional.³

Salah satu contoh kecelakaan jalan raya yang melibatkan anak terjadi pada 29 Oktober 2013. Pada kejadian tersebut, Alfons Gorby Evardo, mahasiswa semester satu di Fakultas Teknik Sipil dan Kelautan ITB, tertabrak oleh seorang pengendara motor berusia 16 tahun saat menyeberang jalan di daerah Tubagus Ismail, Bandung. Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Santo Borromeus dua hari setelah kejadian tersebut..⁴

Kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor bisa memunculkan kehilangan baik materiil ataupun immateriil untuk korban. Sebagai contoh, jika kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban mengalami luka ringan seperti tergores aspal jalan, yang mengharuskan korban untuk dirawat di rumah sakit, sehingga korban serta keluarga harus mengeluarkan biaya pengobatan. Jika kendaraan korban juga rusak akibat kecelakaan, biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan kendaraan akan semakin besar. Dalam kasus yang lebih parah, jika korban kehilangan anggota tubuh yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bekerja, kerugian yang ditanggung oleh korban dan keluarganya pun akan semakin besar.

Jika korban kecelakaan harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan dan/atau perbaikan kendaraan, atau bahkan jika korban meninggal dunia dan merupakan kepala keluarga, Keluarga akan mengalami kerugian yang lebih besar. hingga perihal ini hendak berakibat pada perekonomian serta kejiwaan keluarga yang di tinggalkan oleh korban paling utama anak-anaknya.

a. Rumususan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak?
2. Bagaimana pertanggung jawaban seorang anak secara hukum perdata terhadap korban?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami jenis perlindungan hukum perdata yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak-anak?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban seorang anak secara hukum perdata terhadap korban?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini melihat bahan pustaka atau sumber hukum sekunder.⁵ Riset ini pula diketahui selaku riset doktrinal, di mana hukum kerap dimengerti berlaku seperti

³ Khoeriyah, dalam skripsinya yang berjudul Tanggung Jawab Pidanan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Dul) di Tol Jagorawi), diterbitkan oleh Program Sarjana Ilmu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014: Hukum Islam, halaman 2.

⁴ Boulevarditb. Com, diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 11.00 WITA.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, Jakarta, pada tahun 2013, halaman 13

Apa yang tercantum dalam undang-undang (hukum dalam buku) atau yang berlaku sebagai kaidah atau norma yang dianggap sebagai prinsip atau pedoman perilaku yang sesuai.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh anak

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan memiliki maksud tempat bersembunyi ataupun yakni perbuatan mencegah,⁷ sedangkan kata hukum sendiri ialah berkas peraturan ataupun kaidah yang memiliki isi yang bersifat biasa serta normatif, umum sebab berlaku untuk tiap orang, serta normatif sebab memastikan apa yang sepatutnya dicoba, apa yang tidak bisa dicoba ataupun wajib dicoba dan memastikan bagaimana caranya melakukan disiplin pada kaidah- kaidah hukum.⁸

Bersumberkan pada dua pengertian tersebut, pembelaan hukum secara umum bisa diartikan sebagai langkah perlindungan yang merupakan norma hukum yang mengatur mengenai aturan, kewajiban, dan larangan. Perlindungan hukum mencakup seluruh usaha yang dicoba baik oleh orang ataupun pemerintah dengan tujuan guna melindungi serta menciptakan keselamatan Hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999.

Dalam konteks hukum Indonesia, korban kecelakaan lalu lintas sering kali menjadi pihak yang paling menderita baik secara psikis, fisik, maupun materiil. Korban sering kali merasakan penderitaan ganda, karena sering dianggap hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat dibutuhkan, khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas, mengingat banyak korban yang menghadapi kerugian psikis, fisik, dan materiil akibat kurangnya jaminan hukum bagi Saksi atau korban kecelakaan tersebut..

B. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Definisi korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, atau ekonomi sebagai akibat dari tindak kejahatan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai peristiwa atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja di jalan raya, yang melibatkan kendaraan bermotor, dengan atau tanpa melibatkan pengguna jalan lainnya, yang menyebabkan korban jiwa maupun kerugian material.

Pasal 234 UU LLAJ menetapkan kewajiban serta tanggung jawab Bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada penumpang, pemilik barang, dan pihak ketiga yang dirugikan akibat kelalaian pengemudi adalah pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan umum. Pasal Ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dialami penumpang atau pemilik barang. Tingkat tanggung jawab mereka disesuaikan dengan tingkat kelalaian yang terjadi. Selain mengganti kerugian

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian Hukum, yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, Jakarta, pada tahun 2006, halaman 118.

⁷ Philipus M. Hadjon, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta, pada tahun 1995, halaman 78.

⁸ Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), yang diterbitkan oleh Liberty, Yogyakarta, pada tahun 1991, halaman 38

kepada korban, mereka juga wajib memperbaiki kerusakan pada jalan dan perlengkapannya akibat kelalaian pengemudi. Jika korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 235 UU LLAJ.

C. Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diperoleh setiap orang sejak lahir.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak didefinisikan sebagai sesuatu yang benar, milik atau kepunyaan seseorang, serta kewenangan untuk melakukannya., serta kekuasaan guna melakukan sesuatu berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Selain itu, hak juga dapat merujuk pada kewenangan yang sah atas suatu hal atau dalam suatu konteks tertentu, termasuk derajat atau martabat seseorang.

Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan jika hak korban kecelakaan lalu lintas adalah semua seharusnya diterima oleh korban sebagai akibat dari insiden kecelakaan tersebut. Korban memiliki hak untuk menuntut hak-haknya begitu juga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian, baik fisik, mental, emosional, materiil, maupun gangguan lainnya, maka korban berhak mendapatkan perlindungan, keamanan, serta pertolongan. Berikut adalah beberapa hak umum yang dimiliki oleh korban atau keluarganya:

- a. Hak guna menerima ganti rugi atas penderitaan yang dialami, yang bisa diberikan oleh pelaku atau pihak lain, seperti negara atau lembaga khusus yang menangani kompensasi korban kecelakaan.
- b. Hak guna mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin dilakukan oleh pelaku.
- c. Hak guna mendapatkan di lindungi hukum.
- d. Hak atas perawatan medis.
- e. Hak untuk mendapatkan informasi jika pelaku akan dibebaskan dari tahanan atau melarikan diri.
- f. Hak atas privasi, termasuk perlindungan terhadap informasi individu seperti nomor telepon atau identitas lainnya.

Pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat kelalaian pengguna jalan dan/atau faktor lingkungan. Korban kecelakaan lalu lintas juga mendapatkan perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Asuransi kecelakaan diri ialah bentuk perlindungan yang memberikan kompensasi atas risiko kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cedera direncanakan, dan menimbulkan cedera fisik yang dapat dibuktikan secara medis.¹⁰ Pemerintah berupaya memberikan jaminan perlindungan serta kesejahteraan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik dalam bentuk bantuan medis, kompensasi finansial, maupun kepastian hukum atas hak-hak mereka.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perlindungan hukum mencakup berbagai upaya untuk memenuhi hak dan memastikan rasa aman bagi saksi dan korban. Perlindungan hukum bagi korban merupakan bagian dari perlindungan masyarakat secara keseluruhan dan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

⁹<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/9793>.

¹⁰ H. Mashudi, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995. hal.26.

¹¹ Soerjono Soekanto. Loc. Cit.

Selain ketentuan tersebut, hak korban untuk memperoleh ganti rugi akibat Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur kecelakaan lalu lintas.

Pasal 234 UU LLAJ di atas mengatur tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang, pemilik barang, maupun pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kelalaian pengemudi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dialami oleh penumpang atau pemilik barang.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika korban harus memahami hak-hak yang dimilikinya serta cara untuk Memperoleh pemenuhan hak-hak tersebut sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku menjadi hal yang krusial, salah satunya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses perlindungan korban. Setelah mengetahui hak-haknya, langkah berikutnya yang lebih penting adalah memiliki keberanian untuk meminta hak tersebut. Meskipun ada undang-undang dan lembaga yang bertanggung jawab, upaya ini akan sia-sia tanpa tekad dan keberanian. Akibatnya, korban harus dididik tentang ketentuan yang berlaku agar hak-hak mereka dapat dipenuhi.

2. Pertanggung jawaban seorang anak secara hukum perdata terhadap korban

Tindakan melanggar hukum oleh pengemudi seringkali menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak lain seharusnya memberikan hak kepada Jika pengemudi juga pemilik kendaraan, hal ini tidak akan menjadi masalah besar untuk menuntut pengemudi untuk mengganti kerugian. tersebut. Pengemudi kendaraan umum seperti bus angkutan, bagaimanapun, seringkali hanya bertindak sebagai penyewa atau karyawan yang secara finansial tidak mampu membayar ganti rugi, sehingga pemenuhan tanggung jawab mereka untuk mengganti kerugian tidak sebanding dengan kerugian yang timbul.

Tindakan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau peran dalam pergaulan warga yang baik disebut *zorgvuldigheid* dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun seseorang tidak melanggar bagian hukum tertulis secara langsung, tindakan yang merugikan orang lain tetap bisa dikenakan sanksi perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat ini, kewajiban biasanya tidak ditulis, tetapi diakui oleh masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, hanya Pasal 1365 Kode Hukum Perdata yang mencakup pelanggaran hukum, yang mengartikan perbuatan itu dengan cara terpisah antara kedua artikel. Sedangkan itu, penafsiran aksi melawan hukum dalam maksud besar merupakan pencampuran dari kedua artikel itu. Perbuatan melawan hukum dalam pengertian ini mencakup Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, perbuatan positif disebut *daad* (Pasal 1365), dan perbuatan negatif disebut *nataligheid* (kelalaian) atau *onvoorzichtigheid* (kurang hati-hati).¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, contoh-contoh kerugian yang disebutkan bisa saja memenuhi kriteria kehilangan yang diakibatkan oleh aksi melawan hukum, walaupun hukum tidak dengan cara khusus mengaturnya. Tetapi, ini bukan berarti orang yang dibebani bisa sembarangan menuntut kerugian dari pihak lain. Ada pandangan yang menyatakan bahwa Hoge Raad sering memutuskan bahwa kerugian akibat Perbuatan melawan hukum diatur dengan ketentuan yang sama seperti kerugian yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248), meskipun ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung. Namun, penerapan secara analogis masih dapat dibenarkan.¹³

¹² Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hal.142

Dalam praktik hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan cara biasa, di mana pihak yang dirugikan akan menerima ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, bukan hanya karena kerugian yang sebenarnya, tetapi juga karena keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, kerugian yang dimaksud pada faktor kedua ini, dalam praktiknya, dapat diaplikasikan bersumber pada Ketentuan kerugian yang muncul sebagai dampak dari wanprestasi dalam akad, meskipun aplikasi ini bersifat analogi. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan ketentuan tersebut itu kepada aksi melawan hukum, mengengang tidak terdapat pengaturan lebih lanjut dalam hukum hal perihal ini.

3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan yang dimaksud dalam uraian ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, yang kemudian melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Bagi hukum perdata, seorang dikira bersalah bila bisa disesalkan kalau ia melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu perbuatan yang sepatutnya di jauhi. sikap yang sepatutnya dicoba ataupun tidak dicoba ini tidak bebas dari kemungkinan untuk diperkirakan. Kemungkinan tersebut Harus diukur secara objektif, artinya, orang yang normal dapat memperkirakan dalam situasi tertentu apakah perbuatan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak.¹⁴

Perbuatan melawan hukum ialah tindakan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Kesalahan dalam unsur ini merujuk pada perbuatan yang bisa diperkirakan atau dipertimbangkan oleh akal sehat manusia perbuatan melanggar hukum, bukan hanya karena kerugian yang sebenarnya, tetapi juga karena keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Marheinis Abdulhay menyatakan bahwa "yang dianggap bersalah adalah subjek hukum atau individu (*individu*), karena individu tersebut diakui memiliki hak dan kewajiban".¹⁵ Setiap tindakan yang terjadi dalam interaksi sosial, baik itu perbuatan melawan hukum maupun perbuatan lainnya, pasti melibatkan seorang pelaku. Pelaku inilah yang melakukan tindakan tersebut, dan untuk menilai apakah tindakan tersebut benar atau salah, diperlukan hukum atau norma sebagai dasar penilaiannya.

Ada dua teori yang dipakai guna menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan, yaitu:

a. Teori hubungan factual

Teori *condition sine qua non* yang dikemukakan oleh Van Buri menyatakan bahwa suatu hal adalah penyebab terjadinya akibat, dan akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya sebab. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hukum akan selalu bertanggung jawab jika pelanggaran tersebut memenuhi syarat *condition sine qua non* dan mengakibatkan kerugian.

b. Teori Adequate Veroorzaking

Teori ini membuktikan jika suatu hal dianggap sebagai penyebab dari akibat jika, berdasarkan pengalaman masyarakat, bisa diperkirakan bahwa sebab tersebut akan diikuti oleh dampak tersebut. Berdasarkan teori ini, seseorang yang melaksanakan aksi melawan hukum hanya akan bertanggung jawab atas kehilangan yang dengan cara alami diharapkan terjalin selaku dampak dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, tanggung jawab atas perbuatan anak yang menyebabkan kerugian akan dialihkan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, yang diterbitkan oleh Sumur, Bandung, pada tahun 2011, halaman 85

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, hal.147.

¹⁵ Marheinis Abdulhay, hal.89

guna memelihara dan mendidik anak tersebut, kecuali bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang tepat. Oleh karena itu, orang tua atau wali akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan anak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Mereka diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian anak tersebut, yang mencakup biaya pengobatan, kerusakan properti, serta kompensasi untuk penderitaan yang dialami oleh korban.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak adalah perlindungan yang diberikan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk ganti rugi dan pengobatan, serta perlindungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku didasarkan pada beberapa peraturan yang mengatur tentang hak-hak korban dan tanggungjawab orang tua atau wali anak. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain harus diganti oleh pihak yang melakukan perbuatan tersebut melakukan perbuatan tersebut. Namun, karena anak di bawah umur dianggap belum cakap bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum, tanggung jawab tersebut beralih kepada orang tua atau wali berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdato. Dalam hal ini, korban kecelakaan mempunyai hak guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, baik berupa kerugian material maupun immaterial.
2. Pertanggungjawaban Seorang Anak secara Hukum Perdata terhadap Korban Dalam konteks hukum perdata, seorang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan pada prinsipnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara langsung karena dianggap belum mempunyai kecakapan hukum yang penuh. Menurut Pasal 1367 KUHPerdato, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada orang tua atau wali yang memelihara dan mendidik anak tersebut, kecuali bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang layak. Dengan demikian, Orang tua atau wali bertanggung jawab secara hukum atas apa yang dilakukan anak mereka di bawah pengawasan mereka menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Mereka wajib Mengganti kerugian yang dialami korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kelalaian anak tersebut. Ganti rugi ini bisa berupa biaya pengobatan, kerusakan properti, serta kompensasi atas penderitaan yang dialami korban.

Saran

Untuk mencegah pelanggaran, orang tua harus memberikan edukasi hukum kepada anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta konsekuensi hukum dan moral dari pelanggaran tersebut. Selain itu, orang tua harus memastikan anak tidak menggunakan kendaraan bermotor sebelum mencapai usia legal dan memiliki SIM yang sah, karena memberikan akses kepada anak untuk mengendarai kendaraan tanpa izin adalah kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dalam karyanya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain (Studi Kasus Putusan Sukoharjo)", Addib Rifandi Hafedh Kurnia menulis sebuah naskah publikasi yang diterbitkan pada tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pendahuluan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Transportasi dan Lalu Lintas Skripsi Khoeriyah, Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dari Pandangan Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani di Tol Jagorawi), diterbitkan pada tahun 2014 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Hukum Perusahaan Indonesia, oleh Abdulkadir Muhammad, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti pada tahun 2010.

UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

INTERNET

<https://google.com/merdeka.com/peristiwa-polisi-tetapkan-remaja-13-tahun-tersangkakecelakaan-di-bantul-yang-tewaskan-1-orang>Diaksesulang1/12/2023

Boulevarditb.Com, diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 11.00 WITA.

<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/9793>.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Harly+rumagit&btnG=#d=gs_qabs&t=1739006252075&u=%23p%3DgBsBPhlNwPUJ